

BAB II

PROFIL GUBERNUR DKI JAKARTA PERIODE 2014 – 2022

DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR DI DKI JAKARTA

DARI MASA KE MASA

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hal-hal yang menjadi pondasi dalam penelitian ini sehingga dapat memudahkan pembaca untuk menganalisa lebih lanjut penelitian yang akan disajikan. peneliti akan membagi pembahasan yang selanjutnya dibagi dalam beberapa sub-bab, antara lain :

1. Wilayah Provinsi DKI Jakarta
2. Profil Basuki Tjahaja Purnama
3. Profil Anies Baswedan
4. Janji Politik Basuki Tjahaja Purnama
5. Janji Politik Anies Baswedan
6. Kebijakan Penanggulangan Banjir DKI Jakarta Dari Masa Ke Masa

2.1 Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang akrab disebut Kota Jakarta. Secara geografis DKI Jakarta terletak pada posisi 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur. Berdasarkan Keputusan Gubernur No 1227 Tahun 1989 luas wilayah Provinsi DKI Jakarta yaitu 7.659,02 km² dimana 661,52 km² merupakan luas daratan yang terbagi 6 wilayah diantaranya :

1. Kotamadya Jakarta Pusat 47,90 km²
2. Kotamadya Jakarta Utara 142,20 km²
3. Kotamadya Jakarta Timur 187,73 km²
4. Kotamadya Jakarta Barat 126,15 km²
5. Kotamadya Jakarta Selatan 145,73 km²
6. Kab. Administratif Kepulauan Seribu 11,81 km²

Sumber : Jakarta.go.id

Serta 110 pulau di kepulauan seribu dan 6.997,50 km² sisanya merupakan luas lautan. Provinsi DKI Jakarta terkenal memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia yaitu mencapai 13.600 jiwa per km². Selain itu batas-batas wilayah DKI Jakarta terdapat dua jenis perbatasan yaitu perbatasan laut dan daratan, adapun batas-batas wilayah DKI Jakarta antara lain :

1. Utara berbatasan dengan Laut Jawa
2. Selatan berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat
3. Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat

4. Barat berbatasan dengan Provinsi Banten

Dilihat dari suhu udara, wilayah DKI Jakarta memiliki rata-rata suhu berkisar antara 32,7 °C - 34 °C pada siang hari dan di malam hari berkisar antara 23,8 °C - 25,4 °C. Hal ini menyebabkan DKI Jakarta memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis. DKI Jakarta terletak pada sebelah utara Pulau Jawa, di muara ciliwung, Teluk Jakarta. Dimana DKI Jakarta berada di dataran rendah pada ketinggian rata-rata mencapai 8 meter dpl. Hal ini yang menyebabkan DKI Jakarta sering dilanda banjir pada saat musim penghujan. DKI Jakarta mengalami puncak musim penghujan antara pada bulan Januari hingga Februari dimana rata-rata curah hujan 350 milimeter sedangkan pada musim kemarau terjadi di bulan Agustus dengan rata-rata curah hujan 60 milimeter. Kemudian, dibulan September hingga awal oktober menjadi hari dimana DKI Jakarta memiliki suhu terpanas yang bisa mencapai 40 °C. Sementara itu bagian selatan ialah merupakan daerah pegunungan yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. DKI Jakarta dilewati oleh 13 sungai yang dimana seluruhnya bermuara ke Teluk Jakarta. Cuaca yang terjadi di wilayah DKI Jakarta terpengaruh dari angin laut dan darat yang bertiup secara bergantian antara siang dan malam.

Bedasarkan data BNPB Provinsi DKI Jakarta berada dalam kelas risiko bencana sedang. Adapun pembagiannya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indeks Risiko Bencana per Kabupaten/Kota Provinsi DKI Jakarta

NO.	KABUPATEN/KOTA	SKOR	KELAS RISIKO
1	Jakarta Timur	127	Sedang
2	Jakarta Utara	122	Sedang
3	Jakarta Barat	120	Sedang
4	Jakarta Pusat	96	Sedang
5	Jakarta Selatan	88	Sedang
6	Kepulauan Seribu	65	Sedang

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia 2013 (BNPB Republik Indonesia)

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari lima kotamadya administratif dan satu kabupaten administratif yaitu Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu. Dimana wilayah tersebut terbagi lagi menjadi 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta per 2019 jumlah penduduk mencapai angka 10.557.810. Pada segi kependudukan, mayoritas profesi penduduk DKI Jakarta ialah bergerak di bidang perdagangan, jasa, ekonomi kreatif serta keuangan. Dimana profesi tersebut lah cukup menunjang pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta. Pada sektor keuangan, industri perbankan dan pasar modal yang menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi dengan didukung adanya Bursa Efek Indonesia hal ini cukup memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi.

Pada sektor perdagangan, wilayah pasar seperti Glodok dan Tanah Abang menjadi tempat dengan pusat perputaran uang yang cukup besar. Hal ini di

dukung dengan status Pasar Tanah Abang yang merupakan pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara dimana komoditas ekspornya terdistribusi ke berbagai negara. Sebagai wilayah ibukota negara, Provinsi DKI Jakarta juga merupakan pusat perekonomian, bisnis dan politik di Indonesia hal ini didukung dengan berdirinya berbagai kantor lembaga negara, kementerian, kantor BUMN, perusahaan asing, perwakilan kedutaan besar dari berbagai negara, hingga Istana Kenegaraan.

Adapun payung hukum jalannya Pemerintahan DKI Jakarta yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang No 34 Tahun 1999 Tentang Pemerinyah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta serta Undang-Undang No 11 Tahun 1999 Tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia yang dimana keduanya tidak berlaku lagi.

Status khusus yang dimiliki Provinsi DKI Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibukota setingkat dengan provinsi yang dimana dipimpin oleh seorang gubernur. Oleh karena itu, DKI Jakarta hanya memiliki pembagian wilayah berupa lima kotamadya administratif dan satu kabupaten administrative, dimana hal ini menyebabkan tidak adanya perwakilan rakyat di masing-masing wilayah. Kotamadya administratif tetap sama seperti di daerah lainnya dipimpin oleh seorang Walikota begitu juga Kabupaten administratif dipimpin oleh seorang Bupati. Akan tetapi dalam hal ini Walikota dan Bupati diangkat langsung oleh Gubernur DKI Jakarta tanpa melewati proses pemilihan umum sebelumnya.

Status khusus ini juga membuat Provinsi DKI Jakarta hanya mempunyai DPRD pada tingkat Provinsi.

2.2 Profil Basuki Tjahaja Purnama

Gambar 2.1

Foto Resmi Gubernur DKI Jakarta Periode 2014-2017

Basuki Tjahaja Purnama



Sumber : www.Jakarta.go.id

Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab di sapa Ahok lahir pada 29 Juni 1966 di Manggar, Kab. Belitung Timur, Bangka Belitung. Ahok merupakan anak dari pasangan Indra Tjahaja Purnama dan Buniarti Ningsih yang berasal dari keturunan Tionghoa. Sebelum terjun ke dunia politik Ahok merupakan seorang pengusaha terkenal di Belitung Timur dengan mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor pertambangan untuk PT Timah yaitu CV Panda. Namun hal itu tidak berlangsung lama hanya sekitar dua tahun berselang Ahok memilih untuk mengambil program Master Manajemen Keuangan di Sekolah

Tinggi Manajemen Prasetia Mulya Jakarta pada tahun 1992. Setelah selesai menempuh pendidikan Master nya Ahok kembali bergelut di dunia kontraktor dengan bekerja di PT Simaxindo Primadaya yang bergerak pada bidang kontraktor listrik. Akan tetapi, pada tahun 1995 Ahok kembali membangun sebuah pabrik di Belitung Timur yang bergerak dalam bidang pengelolaan pasir yaitu Gravel Pack Sand (GPS) Namun pada akhirnya pabriknya harus tutup dikarenakan Ahok yang melawan kesewenangan pejabat.

Pada masa kepemimpinannya Ahok dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang blak-blakan, tegas, jujur dan anti dengan korupsi. Karir politik Ahok dimulai dengan terpilih menjadi anggota legislatif anggota kabupaten Belitung Timur untuk periode 2004-2009 melalui pemilihan umum di tahun 2004. Akan tetapi tak berselang lama di tahun 2005. Belum habis Ahok selesai menjalankan kewajibannya sebagai anggota legislatif, Ahok kembali mengikuti konstenstasi pemilu dengan mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati Belitung Timur berpasangan dengan Khairul Effendi,B.Sc yang di usung oleh partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan akhirnya memenangkan pilkada tersebut dengan terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Belitung Timur untuk periode 2005-2010.

Dua tahun berselang, tepatnya di tahun 2012 Ahok kembali mengikuti kontestasi pemilu dengan mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Provinsi DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo. Pada pemilihan tersebut pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama harus melewati dua putaran pemilihan untuk akhirnya terpilih sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur periode 2012-

2017. Dua tahun berselang tepatnya pada 14 November 2014 DPRD DKI Jakarta secara resmi mengumumkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang pada saat itu mencalonkan diri dan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019.

Pada masa kepemimpinannya Ahok dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang jujur dan transparan salah satu nya yang mendorong akan hal tersebut adalah data perihal keuangan daerah yang ia pimpin selalu disampaikan dan dipaparkan kepada publik hal ini bertujuan agar masyarakat mengerti perihal pengeluaran dan pendapatan daerah tersebut. Selain itu Ahok juga aktif untuk mempublikasikan hasil pertemuan atau rapatnya dengan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

Gambar 2.2
Salah satu postingan Basuki Tjahaja Purnama
perihal pertemuan yang dilakukan



Sumber : instagram basukibtp

Pada masa kepemimpinannya di DKI Jakarta Ahok pun secara pribadi juga mendapatkan beberapa penghargaan yaitu Bung Hatta Anti-Corruption Award di

tahun 2013 dan Gus Dur Award di tahun 2016 kedua penghargaan itu didapatkan Ahok karena Ahok dinilai sebagai pribadi atau pejabat yang anti korupsi. Tidak ketinggalan Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan berbagai penghargaan dari BAPPENAS saat masa kepemimpinannya Ahok antara lain :

1. Provinsi dengan kategori terbaik
2. Provinsi dengan perencanaan inovatif
3. Provinsi dengan perencanaan progresif
4. Milenium Development Goals (MDGS)

Akan tetapi, gaya komunikasi Ahok juga dinilai meledak-ledak dan sering disalah artikan oleh masyarakat luas atas gaya bicaranya tersebut. Banyak orang atau masyarakat yang beranggapan bahwa gaya bicara Ahok kurang santun. Akan tetapi dibalik itu, Ahok saat masuk memimpin DKI Jakarta dikenal sebagai pejabat yang tidak gentar dan tidak takut untuk membabat habis orang di tataran pemerintahan Provinsi DKI Jakarta apabila tidak bekerja secara jujur ataupun tidak sesuai dengan konstitusi perda yang ada.

Tidak dapat dipungkiri kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama sudah barang tentu sangat mempengaruhi proses pengambilan atau pembentukan kebijakan yang ada di DKI Jakarta tak terkecuali pada kebijakan penanggulangan banjir yang merupakan salah satu kebijakan vital di DKI Jakarta, maka dari pada itu dalam penelitian ini akan ditelisik lebih mendalam bagaimana kebijakan penanggulangan banjir pada era kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

2.3 Profil Anies Rasyid Baswedan

Gambar 2.3
Foto Resmi Gubernur DKI Jakarta Periode 2017 – 2022
Anies Baswedan



Sumber : Jakarta.go.id

Anies Rasyid Baswedan atau yang akrab disapa Anies Baswedan merupakan kelahiran Kuningan, Jawa Barat pada 07 Mei 1969. Anies dikenal lahir dari keluarga yang intelektual dimana sang ayah Rasyid Basedan merupakan seorang aktivis pergerakan sekaligus sebagai akdemisi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Sementara itu sang ibu Aliyah merupakan seorang professor pada bidang sosial ekonomi di universitas yang sama dengan sang ayah yaitu Universitas Islam Indonesia. Sebagai seorang anak sulung dalam keluarga Anies cukup gemar mengikuti kakeknya AR Baswedan yang menjadi seorang juru ketik dalam hal surat menyurat.

Memasuki dunia remaja Anies Baswedan saat mengenyam pendidikan di SMA 2 Yogyakarta diamanatkan sebagai seorang ketua OSIS selain itu Anies juga aktif dalam mengikuti kegiatan pertukaran pelajar AFS ke Amerika. Setelah

lulus dari bangku SMA, Anies melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dimana, Anies berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM) di tahun 1989. Saat menjadi mahasiswa, Anies cukup aktif melakukan penelitian di PAU (Pusat Antar Universitas) selain itu sama seperti saat masa SMA yang aktif dalam dunia organisasi, Anies juga tergabung dalam organisasi intra kampus yaitu senat mahasiswa serta organisasi ekstra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Islam.

Tidak cukup hanya menyandang gelar sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Anies pun mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi Master di Universitas Maryland, College Park, AS. Program beasiswa yang dijalannya mengharuskan Anies untuk selalu mendapatkan nilai diatas standart, background keluarga Anies yang akademisi sudah barang tentu membentuk sosok Anies yang mahir dalam hal akademik, sehingga hal tersebut tidak begitu menjadi kesulitan bagi Anies dalam menyelesaikan sekolah master nya. Tidak berhenti sampai gelar master diraihnya, Anies pun melanjutkan pendidikannya di Northen Illionis University dalam program Doktoral dengan mengambil fokus kajian ilmu politik. Dalam menjalankan program Doktoralnya, Anies pun juga tetap mendapatkan program beasiswa dan berhasil lulus di tahun 2004. Saat menjalani studinya di AS, Anies disebut sering menulis berbagai jurnal yang betemakan tentang islam maupun politik di Indonesia.

Setelah selesai dari studi nya, Anies tidak langsung terjun dalam dunia perpolitikan Indonesia. Pada tahun 2007 Anies terpilih menjadi rektor Universitas Paramadina dalam masa jabatannya Anies dianggap sebagai salah satu Rektor termuda karena saat pengangkatannya Anies baru menginjakan usianya yang ke

38 tahun. Cukup banyak trobosan yang dilakukan Anies di Universitas Paramadina salah satu nya adalah kuliah anti korupsi pertama yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi swasta di Indonesia. Banyaknya trobosan dan prestasi yang dilakukan membuat Anies kembali terpilih menjadi Rektor Universitas Paramadina dari tahun 2011 hingga tahun 2015.

Pada tahun 2009, Anies bersama rekan timnya membentuk konsep Indonesia Mengajar yang terinspirasi dari pengalamannya saat masih mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Program ini pun disambut baik oleh berbagai pihak mulai dari pihak sponsor yang mendanai keberjalanan program ini hingga para sarjana yang baru saja lulus dari perguruan tinggi ternama di Indonesia. Program ini merupakan program para pengajar muda yang sebelumnya sudah mendapatkan pembekalan dan pelatihan untuk mengajar di kawasan terpencil dan terpelosok di seluruh Indonesia. Sebagai ketua Yayasan Indonesia Mengajar tentunya ingin agar program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia khususnya di daerah-daerah yang tertinggal.

Karier di dunia politik Anies dimulai di tahun 2013, dimana Anies ditunjuk sebagai ketua komite etik KPK oleh Abraham Samad selaku ketua KPK pada masa itu, integritas tinggi yang dimilikinya dipercaya mampu untuk mengurai permasalahan kasus bocornya surat perintah penyidikan (sprindik) kasus korupsi proyek hambalang. Masih di tahun yang sama nama Anies pun santer terdengar kala partai Demokrat mengadakan konvensi calon presiden yang akan maju dari partai Demokrat untuk pemilihan presiden tahun 2014. Partai Demokrat menganggap Anies sebagai tokoh pendidikan yang transformatif sehingga masuk

dalam radar partai Demokrat untuk dapat menjadi calon presiden yang akan diusung. Namun pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 Anies pun ditunjuk oleh Tim Pemenangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk dapat masuk sebagai tim juru bicara. Pemilihan Anies sebagai salah satu tim juru bicara kemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada saat itu bukan lah tanpa alasan akan tetapi Anies dinilai memiliki pengaruh positif dalam dunia pendidikan oleh kaum muda sehingga diharapkan dapat menunjang faktor pendukung electoral dalam kaum muda.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 pun memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang pada saat itu berlawanan dengan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dimana setelah itu Anies diminta untuk masuk kedalam Tim Transisi dan menduduki posisi sebagai Deputy Tim Transisi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Kemudian pada Oktober 2014 Anies masuk dalam jajaran menteri kabinet kerja Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Joko Widodo dan Jusuf Kalla yaitu sebagai Menteri Pendidikan Menengah dan Kebudayaan.

Selama menduduki jabatan menteri, Anies cukup banyak melakukan terobosan kebijakan salah satu nya yang cukup terkenal adalah mengubah hasil dari Ujian Nasional (UN) tidak lagi sebagai penentu kelulusan para siswa. Selain itu, Anies juga melakukan perubahan kebijakan pada kurikulum 2013 untuk mengembalikannya kembali pada kurikulum yang sebelumnya dengan alasan kurikulum 2013 dirasa tidak cocok untuk diterapkan. Namun, satu tahun berselang kinerja Anies dinilai kurang mampu sebagai Menteri Pendidikan hal ini didukung

dengan kurang nya implementasi perihal Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai salah satu program unggulan Jokowi-JK. Sehingga, Anies Baswedan pun di-*reshuffle* dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan digantikan oleh Muhadjir Effendy.

Tahun 2016 Anies Baswedan pun mendeklarasikan dirinya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Pasangan Anies-Sandi didukung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera. Pada pencalonannya di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 pasangan Anies-Sandi resmi memenangkan kontestasi tersebut melalui dua putaran pemilihan dimana pada putaran kedua Anies-Sandi berhasil mendapatkan 57.96% suara mengalahkan calon petahana Ahok-Djarot yang memperoleh 42.04% suara.

Selama masa kepemimpinan nya di DKI Jakarta, Anies Baswedan memiliki gaya kepemimpinan yang dinilai *humanis* bagi warga DKI Jakarta. Salah satu nya seperti yang ia sampaikan selama masa kampanye menjadi calon Gubernur DKI Jakarta bahwa Anies tidak akan melakukan penggusuran warga yang tinggal di bantaran kali. Walaupun keputusan tersebut juga cukup menimbulkan banyak pro dan kontra oleh sebagian masyarakat. Anies juga dinilai sebagai Gubernur yang pro akan umat Islam, hal ini cukup di tunjukan pada masa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dimana beberapa organisasi umat islam yang menjadi pendukung nya salah satu nya adalah Front Pembela Islam (FPI).

2.4 Janji Politik Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan Perihal Kebijakan Penanggulangan Banjir di Wilayah DKI Jakarta

Dalam dunia politik khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur) janji politik yang disampaikan pada masa pemilihan atau kampanye merupakan bagian yang dinilai cukup penting untuk menarik hati pemilih. Karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya masih ada anggapan masyarakat bahwa janji politik yang dilontarkan saat masa kampanye merupakan gambaran sebuah program ataupun gagasan yang selanjutnya akan dilaksanakan apabila pasangan calon kepala daerah tersebut terpilih. Walaupun demikian, janji-janji politik yang dilakukan oleh para kandidat tidak dapat menjadi tolak ukur pasti keberhasilan seorang kepala daerah dalam menjalankan program atau kebijakan pemerintahannya. Janji politik yang dilakukan tidak memiliki ikatan hukum yang jelas sehingga apabila kepala daerah tersebut tidak melaksanakan janji nya maka masyarakat pun tidak akan bisa menuntutnya. Walaupun demikian tetap saja masih banyak masyarakat yang menilai keberhasilan suatu kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan kebijakannya berdasarkan janji politik yang mereka sampaikan saat masa kampanye berlangsung.

Sama halnya yang terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada untuk periode 2012-2017 dan 2017-2021. Mulai dari pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama hingga pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki janji politik nya masing-masing yang dilakukan pada masa kampanye terkhusus yang bersinggungan dengan permasalahan banjir di

wilayah DKI Jakarta, berikut janji politik yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan terkait permasalahan banjir di DKI Jakarta :

2.4.1 Janji Politik Basuki Tjahaja Purnama

Seperti yang sudah di bahas pada subbab sebelumnya, bahwasannya Basuki Tjahaja Purnama pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012-2017 berstatus sebagai wakil gubernur yang berpasangan dengan Joko Widodo. Akan tetapi, pada tahun 2014 Basuki Tjahaja Purnama resmi dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta sampai akhir masa jabatan periode untuk menggantikan Joko Widodo yang pada tahun 2014 terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Berikut janji politik Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama pada masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Tahun 2012 perihal permasalahan Banjir di Wilayah DKI Jakarta :

- a) Pembangunan embung/folder untuk menangkap dan menampung air hujan di setiap kecamatan dan di setiap kelurahan.
- b) Membeli daerah tangkapan air seperti situ/wadu di hulu sungai agar debit air yang masuk ke Jakarta bisa dikendalikan.
- c) Bekerja sama dengan pemerintahan di sekitar Jakarta untuk membuat sebuah otoritas yang mengatur dan mengelola sungai-sungai yang bermuara di Jakarta
- d) Mengintegrasikan seluruh saluran drainase agar tekoneksi dengan kanal-kanal pembuangan air

- e) Memperbaiki drainase yang rusak dan mengganti drainase sesuai kapasitas tampung aliran air.
- f) Mempercepat proyek normalisasi kondisi DAS/DAK di Wilayah Barat (Sungai Pesanggrahan dan Kali Angke)
- g) Mempercepat revitalisasi situ-situ di wilayah Jakarta
- h) Penerbitan regulasi yang mengatur tutup lahan jalan dan ruang terbuka yang mewajibkan penyediaan pori
- i) Menyelesaikan dan memelihara Cengkareng dan Cakung drain, serta Banjir Kanal Barat dan Timur untuk mengoptimalkan fungsinya.

Sumber : ahok.org (Visi-Misi Program Kerja Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama Pemilukada Provinsi DKI Jakarta 2012)

2.4.2 Janji Politik Anies Baswedan

Pada masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan berpasangan Sandiaga Uno. Kurang lebih bernasib sama dengan Basuki Tjahaja Purnama yang ditinggal oleh pasangannya (Joko Widodo) saat pelaksanaan jabatannya sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan pun ditinggal oleh Sandiaga Uno pada tahun 2019 dikarenakan Sandiaga Uno mengikuti kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024 dan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Berikut janji politik Anies Baswedan – Sandiaga Uno pada masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 perihal permasalahan Banjir di Wilayah DKI Jakarta :

- a) Bekerja sama dengan Jawa Barat untuk menghijaukan kembali hutan dan membuat wilayah tangkapan air, seperti danau.
- b) Menerapkan kebijakan nol limpasan (tidak ada air hujan yang menggenang, semuanya masuk ke tanah atau tempat lain seperti danau dan sungai)
- c) Program Biopori dan Sumur Resapan Kolektif (semaksimal mungkin, air yang jatuh di tiap lahan harus masukkan ke dalam tanah, bukan dialirkan ke saluran) dan tiap RT/RW memiliki sumur-sumur resapan sendiri.
- d) Program Penyerapan Air di Ruang Publik (misalnya jalan dan taman)
- e) Jalanan Jakarta memiliki sistem drainase terintegrasi dan menjadi wilayah serapan air

- f) Membangun tanggul pantai dan tanggul sungai untuk wilayah Jakarta yang penurunan permukaan tanahnya ekstrim.
- g) Penanaman kembali hutan mangrove dan pengerukan sungai (dredging) secara rutin (minimal 2 tahun sekali).
- h) Program pengolahan air limbah.
- i) Melakukan audit berkala pada gedung bertingkat dan kawasan komersil yang menggunakan sumur dalam dan belum memiliki reservoir (tempat cadangan) untuk air.
- j) Mendorong agar 75% air hujan meresap, untuk bangunan di atas tanah $5000 m^2$
- k) Mengurangi pembangunan di beberapa titik wilayah Jakarta yang mengalami penurunan tanah secara ekstrim.
- l) Membuat pompa-pompa air berskala besar untuk memompa air ke dalam tanah dan melanjutkan proses normalisasi sungai dengan melibatkan warga.
- m) Saat melakukan normalisasi sungai, akan disediakan rumah baru dan kesempatan kerja bagi penghuni bantaran sungai yang dipindah.
- n) Mengajak warga dalam mencegah banjir (Gerakan Lubang Biopori dan menjaga sungai/saluran air)

Sumber : jakartamajubersama.com (Program Kerja Anies Baswedan – Sandiaga Uno “Jakarta Bebas Banjir”)

2.5 Kebijakan Penanggulangan Banjir DKI Jakarta Dari Masa Ke Masa

Permasalahan banjir di DKI Jakarta bukanlah persoalan baru. Peristiwa banjir yang melanda ibukota sudah sangat akrab bagi warga Jakarta bahkan saat kota ini masihi bernama Batavia. Hingga muncul istilah ataupun pernyataan yang cukup akrab bagi warga Jakarta yaitu “banjir 10 tahunan dan siklus 5 tahunan” yang berarti bahwa banjir besar akan selalu menerjang ibukota pada masa periode tersebut. Hingga saat ini upaya penanggulangan banjir masih terus dilakukan agar warga Jakarta dapat dengan sepenuhnya terbebas dari banjir apabila musim penghujan tiba. Sebelum membahas lebih lanjut pada penelitian ini dimana akan menelisik lebih dalam tentang kebijakan penanggulangan banjir pada era kepemimpinan gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan gubernur Anies Baswedan, peneliti akan memberikan gambaran bahwa sebetulnya kebijakan apa saja yang sudah diupayakan dan dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta.

2.5.1 Kebijakan Penanggulangan Banjir DKI Jakarta Masa Kerajaan

Pada abad ke-5 masehi Jakarta pada masa itu masih belum berdiri sendiri sebagai sebuah kota. Jakarta masuk kedalam Kerajaan Tarumanegara yang dipimpin langsung oleh Raja Purnawarman. Saksi sejarah yaitu Prasasti Tugu yang ditemukan di Jakarta Utara mengatakan pada masa itu bahwa daerah Jakarta sudah mulai akrab dengan peristiwa banjir karena memiliki daratan yang rendah dibanding daerah yang ada disekelilingnya yaitu Bogor, Banten dan Bekasi sehingga pada musim penghujan tiba wilayah Jakarta tidak dapat terhindarkan

dari banjir. Raja Purnawarman pun dikatakan melakukan upaya penggalian Kali Chandrabhaga (di wilayah Bekasi) dan Kali Gomati (atau Kali Mati di wilayah Tangerang) sepanjang 24 km dengan tujuan untuk dapat mengatasi banjir dan dikatakan aliran kali tersebut nantinya langsung dialirkan ke laut.

2.5.2 Kebijakan Penanggulangan Banjir DKI Jakarta Masa Kolonial Belanda

Memasuki masa kolonial Belanda tepatnya pada tahun 1621 Jakarta kembali dilanda banjir besar hal itu terjadi tepat beberapa tahun setelah Belanda berhasil menguasai Batavia setelah merebutnya dari tangan Kesultanan Banten. Pada masa itu, kondisi Batavia masih baru mulai dilakukan pembangunan dan pemukiman akibat sebelumnya terjadi kerusakan yang sangat parah akibat dari perebutan kekuasaan antara Belanda dan Kesultanan Banten. Rumah-rumah warga yang saat itu masih terbuat dari kayu dan berdindingkan anyaman bambu goyah diterjang banjir. Padahal diketahui pemerintahan Gubernur Jendral JP Coen sudah melakukan pembangunan beberapa kanal akan tetapi tetap saja kanal-kanal tersebut nyata nya tidak dapat mengatasi banjir yang terjadi.

Belanda pun mulai menyadari bahwasannya Batavia memiliki kondisi geografi dan topografi yang jauh berbeda dari kota-kota yang ada di Belanda. Batavia atau Jakarta memiliki kondisi geografi yang menunjukkan bahwa kondisinya berada di bawah permukaan laut sehingga menjadi cukup sulit untuk mengalirkan air ke laut menggunakan sistem kanal, belum lagi topografinya yang

cukup rendah yaitu berupa rawa-rawa, hutan dan semak belukar sehingga apabila diterjang banjir setelahnya permukaan tanah akan dipenuhi dengan lumpur.

Tiga puluh tiga tahun berlalu pada masa pemerintahan Gubernur Joan Maetsuycker, Jakarta kembali mengalami banjir besar dimana hal ini disebabkan akibat curah hujan yang tinggi dan tinggi nya debit air kiriman dari hulu (Bogor) sehingga Sungai Ciliwung tidak mampu menahan debit air kemudian meluap. Gubernur Joan Maetsuycker sebelumnya sudah menambah beberapa pembangunan kanal untuk dapat mengatasi banjir akan tetapi tetap saja kanal-kanal yang baru saja dibangun itu tidak mampu mengatasi banjir yang melanda. Cukup banyak faktor yang menyebabkan kanal yang dibangun tidak dapat berfungsi secara maksimal salah satu nya adalah akibat dari tersumbatnya aliran kanal yang ada akibat sampah yang menumpuk belum lagi endapan tanah dan lumpur.

Pada tahun 1634 pemerintahan Belanda kembali membangun kanal batu karang yang langsung diarahkan ke laut dengan tujuan untuk mencegah tersumbatnya jalur masuk kali akibat dari endapan pasir. Akan tetapi, lagi-lagi fungsi kanal menjadi tidak maksimal akibat dari masyarakat yang mulai banyak membuang sampah atau limbah air ke dalam kanal tersebut. Pemerintah Belanda pun melakukan upaya pengerukan kanal dengan memanfaatkan tenaga para narapidana dan warga lainnya akan tetapi hasilnya nihil.

Hingga beberapa kali banjir besar melanda Batavia, Belanda tetap saja optimis untuk menggunakan sistem kanal sebagai upaya penanggulangan banjir di

Batavia kendati demikian tetap saja kanal-kanal tersebut tidak mampu mengatasi permasalahan banjir yang terjadi. Pemerintah Belanda telah berupaya untuk melakukan pengerukan lumpur atau sampah pada kanal saat musim kemarau akan tetapi hal tersebut malah menimbulkan permasalahan baru dimana lumpur atau sampah hasil pengerukan tersebut dibiarkan mengering di tepi-tepi kanal sehingga menciptakan bau busuk dan sumber penyakit. Pada akhirnya di tahun 1911 Belanda melakukan upaya lain dalam hal penanggulangan banjir di Batavia yaitu dengan membangun pintu air Bendung Katulampa di Bogor, dimana ini bertujuan untuk mengukur debit air Kali Ciliwung yang nantinya akan mengalir ke Batavia dari Bogor, sehingga dapat menjadi peringatan pemerintah Batavia pada masa itu untuk mulai mengantisipasi apabila debit air di Bendung Katulampa sudah cukup tinggi. Hal itu pun terbukti cukup ampuh dan masih dipergunakan hingga saat ini.

Hingga akhir masa kepemimpinan pemerintahannya, Belanda nyata nya tidak berhasil untuk melakukan pencegahan atau upaya penanggulangan banjir melalui sistem kanal yang dicanangkan. Para warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa harus mengungsi ketempat-tempat yang lebih tinggi di tempat pengungsian yang telah disediakan ataupun barak-barak para tentara Belanda, belum lagi saat terjadi banjir warga menjadi sangat rentan untuk terkena penyakit seperti korela, diare, penyakit kulit hingga penyakit yang cukup mematikan yaitu malairia akibat banjir yang melanda bisa berlangsung selama beberapa hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya sistem kanal yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda masih belum mampu untuk mengatasi banjir yang melanda Batavia atau Jakarta.

2.5.3 Kebijakan Penanggulangan Banjir DKI Jakarta Masa Orde Lama

Setelah Indonesia jatuh ketangan Jepang pada tahun 1942 tidak banyak perubahan kebijakan ataupun upaya mitigasi yang dilakukan untuk mencegah banjir yang dapat melanda Jakarta. Hingga Indonesia merdeka di tahun 1945 Pemerintahan Jakarta pada masa itu yang dipimpin oleh walikota (belum gubernur) yaitu Suwiryo (1945-1951), Syamsurizal (1951-1953), hingga Sumarno (1960-1964 dan 1965-1966) masih belum melakukan banyak upaya ataupun trobosan untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwasannya selama periode tersebut banjir besar terus melanda Jakarta apabila memasuki musim penghujan yaitu di tahun 1950, 1952, 1960 dan 1963. Selama Jakarta terendam banjir banyak warga yang diharuskan mengungsi dikarenakan rumah-rumah mereka yang tidak layak untuk ditempati selama air masih menggenangi rumah mereka. Selama banjir besar terjadi rata-rata tinggi air yang menggenang bisa sampai 1-1,5 m atau di beberapa wilayah ketinggian air bisa mencapai atap-atap rumah warga.

Penyebab banjir besar pada masa ini salah satu nya adalah dari tingginya curah hujan yang mengguyur Jakarta, dimana pada tahun 1963 curah hujan mencapai 790,6 mm dimana itu merupakan curah hujan tertinggi selama tahun 1963. Pemerintah Jakarta pada masa itu lebih kepada melakukan upaya untuk membantu warga yang mengalami banjir seperti memberikan bantuan obat-obatan, bahan makanan, pakaian dan tenda-tenda pengungsian. Tidak hanya itu, dikarenakan air banjir yang menggenang cenderung berwarna kecoklatan yang menandakan bahwa air tersebut kotor sehingga banyak pula warga yang mulai

diserang penyakit seperti diare dan gatal-gatal, puskesmas hingga rumah sakit pun disediakan agar mampu mengobati warga yang sakit akibat banjir yang melanda.

Akibat dari sering terjadi nya banjir yang melanda Jakarta yang dimana merupakan ibukota negara Indonesia, Presiden Soekarno pada saat itu membentuk Komando Proyek (Kopro) di tahun 1965 dimana proyek ini bertujuan untuk memperbaiki kanal-kanal yang sudah ada bekas peninggalan masa pemerintahan Belanda serta membangun beberapa waduk di sekitar Jakarta sebagai tempat penampungan air. Pada dasarnya konsep pada proyek ini sudah ada sejak zaman Hindia-Belanda dimana disusun oleh pejabat BOW yaitu Prof. H van Breen. Adapun hasil pembangunan dari Komando Proyek (Kopro) yang telah dibentuk tersebut antara lain :

Tabel 2.2

Hasil Pembangunan Komando Proyek (Kopro) 1965

NO	WADUK	POLDER	SODETAN KALI
1	Setia Budi	Melati	Kali Grogol
2	Pluit	Pluit	Kali Pesanggrahan
3	Tomang	Grogol	Gorong-gorong Jalan Sudirman
4	Grogol	Setia Budi Barat	
5	Revitalisasi sungai di sekitarnya	Setia Budi Timur	

Sumber : Banjir Jakarta : dari zaman Jenderal JP Coen (1621) sampai Gubernur Jokowi (2013)

2.5.4 Kebijakan Penanggulangan Banjir DKI Jakarta Masa Orde Baru

Memasuki masa orde baru tepatnya di tahun 1976 Jakarta kembali mengalami banjir besar dimana menurut data yang ada banjir berlangsung hingga hampir satu bulan lamanya yaitu mulai 1-26 Januari 1976 dan diperkirakan warga yang mengungsi hingga 200.000 orang. Pada masa itu ketinggian air mencapai 30 cm bahkan di beberapa tempat bisa mencapai 90 cm seperti di Kebon Nanas, Jagalan, Cipinang, dan Cipinang Muara. Cukup banyak kerugian yang dirasakan oleh warga akibat dari banjir yang melanda mulai dari rumah-rumah mereka yang kotor, perabotan rumah yang rusak atau bahkan tidak dapat digunakan kembali hingga terserang penyakit akibat air banjir yang kotor. Pemerintah Jakarta seperti yang selalu dilakukan saat terjadi banjir sudah siap untuk melakukan upaya mitigasi bagi warga yang terdampak banjir seperti membangun tenda-tenda pengungsian dan membantu memberikan pasokan makanan dan obat-obatan.

Gubernur Ali Sadikin yang pada masa itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mengaku kualahan dalam mengatasi banjir yang melanda ibukota. Sebetulnya dari Pemerintah Daerah Jakarta itu sendiri sudah melakukan upaya pencegahan banjir dengan menyusun sebuah Rencana Induk Jakarta tahun 1966-1988. Dimana salah satu nya ialah merupakan Rencana Tata Ruang dalam penyusunan Master Plan Pengendalian Banjir yang selanjutnya di sahkan pada 1973. Pada master plan ini memiliki sistem yang bersifat menganut konsep yang pernah dilakukan oleh Komando Proyek (Kompro) di tahun 1965 akan tetapi kali ini lebih dilakukan beberapa penyesuaian dengan melihat kondisi fisik Jakarta pada masa itu.

Rencana pembangunan saluran kolektor menjadi salah satu langkah prioritas dalam master plan tersebut. Adapun langkah-langkah pembangunannya sebagai berikut :

- a) Memperpanjang Saluran Kolektor “Cengkareng Drain” ke arah Barat
- b) Membangun Saluran Kolektor “Cakung Drain” di bagian Timur guna menampung aliran air dari Kali Sunter, Buaran, Cakung, dan Jati Kramat.

Dengan pembangunan saluran kolektor tersebut sebetulnya Jakarta menjadi memiliki tiga Banjir Kanal antara lain pada bagian Timur, Tengah dan Barat kota. Akan tetapi langkah yang sudah diambil dan dilakukan tersebut tetap saja tidak dapat mencegah datangnya banjir di tahun 1976 sehingga setelah banjir besar di tahun 1976, master plan 1973 mengalami evaluasi. Hal ini dilakukan mengingat kondisi kota Jakarta yang sudah cukup berkembang dalam sisi pembangunannya belum lagi tingginya biaya pembebasan lahan sering menjadi faktor penghambat implementasi master plan yang dicanangkan.

Setelah melalui evaluasi, master plan 1973 berubah menjadi Modifikasi Master Plan 1981 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Banjir kanal yang ada tetap untuk menampung aliran air dari Kali Ciliwung, Kali Cideng, Kali Krukut, dan bermuara di Muara Angke

- b) Pompa Cideng digunakan untuk menampung air Kali Cideng Bawah
- c) Sodetan Kali Sekretaris-Grogol untuk menampung air Kali Sekertaris dan Kali Grogol
- d) Saluran Banjir Cengkareng (Cengkareng Drain) menampung aliran air dari Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, Sungai Moorkervart
- e) Pengembangan area layanan Polder (waduk dan pompa)
- f) Pengembangan area layanan normalisasi dan sodetan kali

Pada masa kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin hingga tahun 1977 banjir terus melanda ibukota apabila sudah memasuki musim penghujan. Segala rencana dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Jakarta pada masa itu nyatanya masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Di penghujung masa jabatannya Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1977 Jakarta kembali mengalami banjir besar dimana salah satu nya di Jakarta Utara sendiri sampai setidaknya 126.000 warga harus mengungsi dari rumah mereka masing-masing akibat terendam banjir. Gubernur Ali Sadikin selain melakukan upaya pembangunan dan pemaksimalan sistem drainase di Jakarta, Ia juga berupaya untuk melakukan koordinasi lintas darah dan lintas sektor di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) hingga koordinasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat. Faktor lainnya mengapa upaya penanggulangan banjir pada saat itu masih belum maksimal ialah akibat terbatasnya dana serta pertumbuhan penduduk dan infrastruktur yang setiap masa nya berkembang pesat. Tidak sampai disitu beberapa kalangan masyarakat pun turut memberikan kritik kepada

Pemerintah Jakarta dalam upaya penanggulangan banjir agar saat musim penghujan tiba banjir tidak terus terjadi yaitu dengan membuat Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).

2.5.5 Kebijakan Penanggulangan Banjir DKI Jakarta Masa Reformasi

Memasuki masa reformasi Jakarta masih saja dilanda banjir ketika memasuki musim penghujan. Seperti yang terjadi di tahun 2002 dimana ini merupakan banjir terbesar dibanding banjir-banjir 10 tahun sebelumnya, dimana 42 kecamatan terendam dengan total luas wilayah hingga 16.041 hektare atau 24,25% dari wilayah Jakarta terendam banjir. Akibatnya warga yang rumah nya terdampak pun dipaksa harus mengungsi ketempat yang lebih aman dan tinggi. Banjir ini pun tak luput dari korban jiwa hingga 21 orang meninggal dunia.

Pada saat banjir ini terjadi aparat walikota dan sejumlah warga melakukan upaya mitigasi sementara akibat banyaknya tanggul yang jebol diterjang deras nya aliran air. Upaya penanggulangan yang dilakukan antara lain dengan melakukan pemasangan karung pasir dan cerucuk bamboo sepanjang 35 cm. Banjir yang melanda kali ini cukup menimbulkan polemik di tengah warga Jakarta dimana saat itu Sutiyoso sebagai Gubernur Jakarta menjadi bulan-bulanan masyarakat karena dianggap gagal dalam upaya mengantisipasi terjadinya banjir yang sering melanda apabila musim penghujan. Banjir tahun 2002 ini setidaknya menimbulkan 21 korban jiwa dan 365.000 warga Jakarta terpaksa mengungsi akibat terendamnya rumah-rumah mereka. Beberapa kalangan yang memprotes Gubernur Jakarta karena dianggap gagal dalam melakukan upaya

penanggulangan banjir di Jakarta antara lain Indonesian Corruption Watch (ICW), Urban Poor Consortium (UPC) dan LBH Jakarta menilai bahwa banjir yang terjadi kali ini sudah merugikan setidaknya 70% warga ibukota. Kritik juga disampaikan karena Pemerintah Jakarta dinilai tidak serius dalam melakukan upaya penanggulangan banjir dengan hanya mengalokasikan Rp 294,7 miliar yang dianggap sangat kecil dan tidak dapat mungkin untuk melakukan pembangunan proyek besar untuk menghadapi banjir di Jakarta.